



Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2014

"Evaluasi Kinerja Kemdikbud Tahun 2010-2014 dan Penuntasan Implementasi Kurikulum 2013"

HASIL SIDANG KOMISI VIII

SUSUNAN TIM PERUMUS SIDANG KOMISI VIII

Ketua Komisi : Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London
Koordinator Perumus : Inspektur Jenderal
Anggota Tim Perumus :

1. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan
2. Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional
3. Sekretaris Itjen
4. Kepala Biro Perencanaan dan KLN
5. Kepala Biro Umum
6. Kepala Biro Kepegawaian
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
8. Kepala Biro Keuangan
9. Kepala Pusat Informasi dan Humas
10. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
11. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Itjen
13. Pejabat Badan PP Bahasa

Anggota Komisi : **81 Orang**
TIM Substansi : **8 Orang**

HASIL

DISKUSI SIDANG KOMISI VIII

SUB TOPIK 1 : REFORMASI BIROKRASI

No	ISU	REKOMENDASI
1	Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik tidak seragam antara masing-masing jenjang pendidikan	Perlu evaluasi lebih lanjut struktur organisasi dan proses pengelolaan dan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2	Terdapat permasalahan pengelolaan guru khususnya di daerah 3T	<ul style="list-style-type: none">• Perlu ditinjau ulang ratio guru : siswa per rombel untuk sertifikasi guru pada daerah yang jumlah siswanya rendah• Perlu penambahan jumlah guru di daerah 3T melalui SM-3T
3	Kontradiksi SK pembayaran tunjangan profesi guru pada bulan Februari dengan revisinya yang terbit pada bulan Juli	Perlu konsistensi kebijakan pembayaran tunjangan profesi guru
4	Perbedaan pengelolaan guru antara Kemdikbud dengan Kemenag	Perlu koordinasi dan sinkronisasi antara Kemendikbud dan Kemenag
5	Nomenklatur di tingkat pusat dan daerah masih berbeda-beda (Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Pendidikan)	Perlu dilakukan koordinasi dengan Kemdagri untuk penyamaan nomenklatur dinas di daerah.

SUB TOPIK 2 : TLHP, WBK, ZI, dan Gratifikasi

No	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI
1	Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI perlu ditingkatkan	Dilakukan koordinasi dan percepatan tindak lanjut hasil audit
2	Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Integritas belum mencakup keseluruhan Unit Utama	Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih kepada Unit Utama
3	Program pengendalian gratifikasi masih belum terdengar sampai ke daerah	Program pengendalian gratifikasi yang digagas oleh Inspektorat Jenderal perlu terus ditingkatkan

SUB TOPIK 3 : SEKOLAH INDONESIA LUAR NEGERI

No	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI
1	Perlu penyatuan pendanaan SILN di Kemdikbud (termasuk gaji guru yang selama ini dibayarkan oleh Kemlu)	Mempercepat proses penandatanganan kesepakatan bersama Mendikbud dengan Menlu tentang pendanaan SILN
2	Program paket (A,B, dan C) di <i>Community Learning Centre</i> dan <i>SILN</i> perlu tambahan pendanaan dan percepatan proses	Berkoordinasi dengan Dikdas dan Dikmen untuk menyediakan anggaran pendanaan ujian untuk Program Paket di luar negeri
3	Diperlukan kebijakan terkait dengan kelanjutan pendidikan peserta didik lulusan paket A dari <i>CLC (Community Learning Centre)</i> ,	alternatif kelanjutan sekolah dengan membangun sekolah di daerah perbatasan atau membangun SILN.
4	Ijazah kelulusan paket A, B, dan C sangat terlambat diterima oleh peserta didik	Berkoordinasi dengan Dikdas dan Dikmen
5	Perlu upaya-upaya peningkatan kompetensi pendayagunaan TIK guru-guru SILN	Perlu dilakukan pelatihan terkait TIK oleh Kemdikbud

SUB TOPIK 4 : RENSTRA KEMENDIKBUD 2015-2019

No	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI
1	Renstra 2015-2019 perlu memasukkan kebijakan yang berpihak pada tingkat daerah	Pembahasan Renstra Kemdikbud perlu melibatkan teman-teman dari Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota
2	Kebijakan target satu desa satu PAUD belum didukung pendanaan yang cukup	Program satu desa satu PAUD harus dikaji kembali untuk pendanaannya.

TERIMAKASIH